

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penguatan kapasitas dalam penerapan *e-goverment* pada UPT Pendapatan Daerah merupakan bentuk dari penguatan kapasitas pada sumber daya manusia dan penguatan fasilitas guna meningkatkan penguatan kelembagaan serta meningkatkan proses pelayanan yang baik. Dalam penelitian ini mengacu pada teori penguatan kapasitas dan berdasarkan indikator - indikator serta hasil analisa, didukung dengan data wawancara dan observasi di lapangan, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang belum sepenuhnya maksimal dalam pencapaian target kepuasan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan sumber daya baik itu sumber daya manusia baik itu dengan peningkatan pendidikan, dan pelatihan berupa Bimtek penetapan dalam upaya mendukung proses pencapaian tujuan yang memuaskan.
2. Lebih ditingkatkan lagi kerja sama yang baik pada UPT Pendapatan daerah, dalam proses penguatan kapasitas pada UPT Pendapatan lebih memperkuat manajemen sehingga adanya pembagian tugas yang merata serta tercapainya tanggung jawab tugas sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
3. Adanya kerja sama yang baik sehingga terciptanya penguatan manajemen. Tercapainya visi dan misi dari organisasi dalam konteks pendapatan daerah dan pungutan berupa pajak merupakan tujuan utama dari UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang.

4. Kesesuaian teknologi berupa Samsat *online* merupakan salah satu strategi yang digunakan Dispenda untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan adanya Samsat *online* masyarakat lebih mudah mengakses dan lebih muda dalam membayar pajak, dengan adanya Samsat *online* perlu ditingkatkan lagi jumlah sarana dan fasilitas pendukung berupa komputer dan gedung guna memperlancar proses kerja dan pencapaian misi dari UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang.
5. Terciptanya penguatan kelembagaan yang menyimpulkan adanya pembagian tugas yang baik, serta terciptanya akuntabilitas kerja yang berkompeten sehingga dapat menciptakan profesionalisme kerja sesuai dengan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang.
6. Penerapan teori penguatan kapasitas dalam memperkuat dan pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, upaya penghematan waktu pelayanan serta tercapainya ketepatan dan kecepatan waktu dalam proses pencapaian tujuan belum dijalankan secara baik oleh UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang, karena minimnya pelatihan, serta alat pendukung lainnya berupa sarana dan fasilitas pendukung.

B. Saran

Dalam rangka penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, sarana dan fasilitas pendukung pada UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dibutuhkan pengembangan personal dalam usaha meningkatkan kualitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan sehingga tercapai tujuan dan hasil yang diinginkan berupa pengetahuan, keterampilan dalam bekerja serta terciptanya profesionalisme kerja.
2. UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang harus tampil lebih dipercayai oleh masyarakat sehingga tercapainya wajib pajak yang sadar akan kewajibannya sehingga Dispenda dapat mencapai target dan tujuan yang diinginkan, UPT Pendapatan harus meningkatkan lagi pembagian tugas yang merata sehingga terciptanya suatu tanggung jawab kerja yang baik dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan.
3. UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan yang digunakan dalam upaya pelaksanaan tugas serta efisiensi waktu dan kerja.
4. Perlu adanya Diklat, Bimtek dan *workshop* secara bertahap dan berkala dalam jumlah peserta yang banyak sehingga terciptanya keahlian dan kemampuan baik yang dapat mewujudkan proses pencapaian PAD.
5. UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang perlu mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku -buku

Anneli Milen, 2006: *Capacity Building*, Pembaruan PO. BOX. 1253.Yogyakarta.

Hildebrand, Mary E dan Merilee S Grindle, 1994, “*Building Capacity: Challenge for Public Sector*”, Harvard University, November 1994

Indrajit, ER (2005): *E-Government in Action*, jilid 2. Yogyakarta.

Nawawi Hadadi, 1987: *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Universitas Press, Jakarta.

Warsito, 2003. *Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Puskodak. UNDIP. Semarang.

Skripsi-skripsi

Martiana M. Riha Hengki, 2001. *Skripsi, Suatu Studi Tentang Kapasitas Aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 di Kabupaten Ende*. FISIP Unwira. Kupang.

Pukan Petrus, 2013: *Skripsi, Peranan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (Piar) Dalam Pengembangan Kapasitas Organisasi Masyarakat*. FISIP Unwira. Kupang.

Tim Peneliti, 2012 “*Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*”, STIA LAN. Makassar.

Jurnal

UNDP, 1997: *Capacity Development, Technical Advisory Paper II*. In : Capacity Development Resource Book. UNDP.

Dokumen- dokumen

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Webseite *e-government*. <http://andra354.Multiply.com/>.

[webseite 2012/02/27/peran *capacity building* dalam upaya meningkatkan eksistensi kinerja pegawai negeri sipil/](#).

Inpres No.3, Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Elektroik (e-government)*. Jakarta.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003